



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR

**LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN
KEPALA DAERAH
[LKPJ]**

TAHUN 2022

**BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR**

Jln. Ile Lewotolok No. Telp / Fax [0383] 21240

LARANTUKA

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur patut kami haturkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena bimbingan dan penyelenggaraan Ilahi-Nya, sehingga dapat diselesaikan Laporan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2022 dalam rangka penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPI) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2022. Dengan penuh keterbukaan dan senang hati kami mengharapkan saran dan kritik dari semua pihak demi kesempurnaan penyusunan laporan ini pada masa yang akan datang.

Akhir kata, semoga Laporan ini dapat bermanfaat khususnya bagi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Flores Timur dan Pemerintah Kabupaten Flores Timur pada umumnya dan sebagai bahan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPI) Kepala Daerah Tahun 2022. Semoga bermanfaat. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati dan menyertai tugas dan karya kita sekalian. Sekian dan terima kasih.

Larantuka, Januari 2023

Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Kabupaten Flores Timur,



IRUFUS KODA TELUMA, S.Sos
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19690725 199793 1 005

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar isi	ii
Bab I Pendahuluan	1
1.1. Dasar Hukum (Diisi oleh Tim Penyusun)	1
1.2. Visi dan Misi Kepala Daerah (Diisi oleh Tim Penyusun)	1
1.3. Data Umum Daerah	1
1. Data Geografis Wilayah (Diisi oleh Tim Penyusun)	1
2. Jumlah Pendudukn (Diisi oleh Dinas Kependudukan dan Capil)	1
3. Pertumbuhan Penduduk (Diisi oleh Dinas Kependudukan dan Capil)	1
4. Jumlah PNS (Diisi oleh BKPSDMD)	1
5. Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan (Diisi oleh BKAD)	1
6. Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja (Diisi oleh BKAD)	1
7. Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan (Diisi oleh BKAD)	1
<u>Bab II Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Tim Penyusun)</u>	<u>2</u>
<u>Bab III Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah</u>	<u>3</u>
3.1. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan	3
1. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program	
Yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja	8
3.2. Kebijakan Strategis yang Ditetapkan (Tidak Ada)	38
3.3. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya	38
<u>Bab IV Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Penugasan</u>	<u>39</u>
<u>Bab V Penutup</u>	<u>40</u>

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Dasar Hukum (Diisi oleh Tim Penyusun)

1.2. Visi dan Misi Kepala Daerah (Diisi oleh Tim Penyusun)

1.3. Data Umum Daerah (Diisi oleh Tim Penyusun)

1. Data Geografis Wilayah (Diisi oleh Tim Penyusun).
2. Jumlah Penduduk (Diisi oleh Dinas Penduk Capil).
3. Pertumbuhan Penduduk (Diisi oleh Dinas Penduk Capil).
4. Jumlah ASN.

Jumlah PNS Kabupaten Flores Timur per 31 Desember 2022 sebanyak 4.549 orang
dan PPPK sebanyak : 343 orang

5. Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan (Diisi oleh BKAD).
6. Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja (Diisi oleh BKAD).
7. Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan (Diisi oleh BKAD).

BAB III
HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

3.1. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

No.	OPD Pelaksana	Urusan Pemerintahan	Kebijakan	Uralan Program Kegiatan/Sub Keg.	Target		Realisasi				Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tinjauan
					Kinerja	Anggaran	Kinerja (%)		Anggaran (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8		9		10	11	12
1	BPKPSDMD	Kepegawalan		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	38.839	3.433.223.451	38.839	100,00	3.260.549.911	94,97			
				Perencanaan ,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7	67.629.000	7	100,00	67.628.888	100,00			
				Koordinasi dan Penyusunan 1 Laporan, Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Dok	67.629.000	7	100,00	67.628.888	100,00			
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	26	3.085.445.894	26	100,00	2.916.576.128	94,53			
				1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14 bln	3.047.945.894	14	100,00	2.884.326.128	94,63			
				Pelaksanaan Penata usahaan dan 2 Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 bln	37.500.000	12	100,00	32.250.000	86,00			
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	38.660	186.358.500	38.661	100,00	186.194.500	99,91			
				1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2 Jenis	3.000.000	2	100,00	2.986.000	99,53			
				2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30 Jenis	36.994.500	30	100,00	36.994.500	100,00			
					12 Jenis	3.004.000	12	100,00	3.004.000	100,00			
				3 Penyediaan barang Cetak dan Penggandaan	37.500 Lembar	15.000.000	37.500	100,00	15.000.000	100,00			
				4 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan	1 Jenis	900.000	1	100,00	900.000	100,00			
				5 Fasilitasi Kunjungan Tamu	1100 Porsl	40.000.000	1100	100,00	40.000.000	100,00			

No.	OPD Pelaksana	Urusan Pemerintahan	Kebijakan	Uraian Program Kegiatan/Sub Keg.	Target		Realisasi				Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tinjau rakor
					Kinerja	Anggaran	Kinerja (%)		Anggaran (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8		9		10	11	12
				6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 kali	87.460.000	16	106,67	87.310.000	99,83			
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	113	39.580.000	113	100,00	36.100.496	91,21			
				1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100 lembar	1.000.000	100	100,00	994.000	99,40			
				2 Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya Air dan Listrik	12 bulan	28.980.000	12	100,00	25.506.496	88,01			
				3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Orang	9.600.000	1	100,00	9.600.000	100,00			
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	33	54.210.057	32	96,97	54.049.899	99,70			
				1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	1 Unit	45.310.057	1	100,00	45.198.899	99,75			
					5 Unit		4	80,00					
				2 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	3.000.000	1	100,00	3.000.000	100,00			
				3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12 Unit	3.000.000	12	100,00	2.959.000	98,63			
				4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	14 Unit	2.900.000	14	100,00	2.892.000	99,72			
1	BPKPSDMD	Kepegawaian		Program Kepegawaian Daerah	8.750	1.784.305.200	10.457	119,51	1.704.052.333	95,50			
				Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian	7.950	694.358.500	9.497	119,46	655.417.381	94,39			

No.	OPD Pelaksana	Urusan Pemerintahan	Kebijakan	Uraian Program Kegiatan/Sub Keg.	Target		Realisasi				Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tinjau rekrut
					Kinerja	Anggaran	Kinerja (%)		Anggaran (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8		9		10	11	12
				Penyusunan Rencana Kebutuhan, 1 Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	500 orang	538.128.500	698	139,60	499.452.581	92,81	* Belum memiliki ruang CAT khusus untuk pelaksanaan test	* Sewa pakai gedung yang bisa menampung peserta test	
					500 orang		344	68,80			* Masih terbatasnya jumlah perangkat PC untuk pelaksanaan test	* Meminjam pada sekolah yang memiliki perangkat PC yg memenuhi standar	
					500 formasi		744	148,80			* Regulasi yang berubah untuk pelaksanaan test	* Menyesuaikan dgn regulasi yg ada	
			✓	2 Koordinasi Pelaksanaan Adminlstrasi Pemberhentian	150 orang	59.290.000	239	159,33	59.049.000	99,59	* Kesalahan data di database saat pengusulan seperti nama, masa kerja ,	* Koordinasi langsung dengan BKN	
				3 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawalan	5800 File	48.150.000	7078	122,03	48.125.800	99,95	* Suplay data dari subbid yg lain terlambat akibat keterlambatan	* Koodinasi dengan subbid yang bersangkutan	
				4 Pengelolaan Data Kepegawalan	500 kartu	48.790.000	394	78,80	48.790.000	100,00	* Data Dukung selalu kurang menghambat proses	* Koordinasi langsung dengan OPD terkait	
				Mutasi dan Promos ASN	2680	783.529.000	2760	102,99	743.734.552	94,92			
			✓	1 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	2380 orang	138.368.000	2410	101,26	137.167.680	99,13	* Proses verifikasi di BKN terlambat sehingga SK Pangkat terlambat	* Koordinasi langsung dengan BKN * Sosia-lisasi bagi para pengelola Kepeg di OPD	
											* Anggaran terbatas dan terbatasnya fasilitas akibat diberlakukan sistem digitalisasi	* Penambahan anggaran fasilitas untuk mendukung kegiatan	

No.	OPD Pelaksana	Urusan Pemerintahan	Kebijakan	Uraian Program Kegiatan/Sub Keg.	Target		Realisasi				Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tingkat realisasi
					Kinerja	Anggaran	Kinerja (%)		Anggaran (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8		9		10	11	12
			✓	2 Pengelolaan Promosi ASN	300 org/dok	645.161.000	350	116,67	606.566.872	94,02	* Menunggu Rekomendasi Pelaksanaan dari KSN dan Kemendagri yang lama mempengaruhi jadwal pelaksanaannya(pan sel atau pemetaan/ujikompe	* Koordinasi langsung dengan Kemendagri dan KSN	
			✓	Pengembangan Kompetensi ASN	700	214.622.700	755	107,86	213.358.400	99,41			
				1 Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	100 orang	33.750.000	55	55,00	33.720.400	99,91	* Banyak jabatan yang sudah di lakukan Penyetaraan jabatan dan itu mempengaruhi peserta sehingga		
				2 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	100 orang	145.137.700	90	90,00	144.293.000	99,42	* Laporan dari mahasiswa Tubel, lbel sering tidak tepat waktu	* Koordinasi dengan mahasiswa yang bersangkutan	
				3 Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	500 orang	35.735.000	610	122,00	35.345.000	98,91	* Data Dukung selalu kurang menghambat proses	* Koordinasi langsung dengan OPD terkait	
			✓	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	40	91.795.000	41	102,50	91.542.000	99,72			
				1 Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	20 orang	47.385.000	20	100,00	47.382.000	99,99	* Target penerima SLKS terbatas, karena terbatasnya anggaran	* Penambahan anggaran untuk mendukung kegiatan ini	
				2 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin PNS	20 kasus	44.410.000	21	105,00	44.160.000	99,44	* Laporan dari OPD sering terlambat	* Koordinasi dengan OPD melalui surat	
											* Penyampaian LHP dari Inspektorat terlambat	* Koordinasi dengan Inspektorat secara langsung	

No.	OPD Pelaksana	Urutan Pemerintahan	Kebijakan	Uraian Program Kegiatan/Sub Keg.	Target		Realisasi				Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tinjauan
					Kinerja	Anggaran	Kinerja (%)		Anggaran (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8		9		10	11	12
		Pendidikan &		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	174	2.077.433.000	135	77,59	2.014.537.700	96,97			
		Pelatihan		Sertifikasi, Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi dan	174	2.077.433.000	135	77,59	2.014.537.700	96,97			
				1 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, JPT, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	168 CPNS	1.804.077.000	129	76,79	1.761.942.500	97,66	* Uang saku peserta yg terbatas	* Penambahan anggaran untuk mendukung kegiatan ini	
				2 Pembinaan, Pengordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan SB dan Kerjasama serta Pengembangan Kompetensi	6 orang	273.356.000	6	100,00	252.595.200	92,41	* Jumlah peserta yang terbatas	* Penambahan anggaran untuk mendukung kegiatan ini	
				TOTAL	47.763	7.294.961.651	49.431	103,49	6.979.139.944	95,67			

3.1.1. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Tahun Anggaran 2022 dapat digambarkan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.1. Pengukuran Capaian Kinerja dengan Target Perjanjian Kinerja

Program	Kegiatan					% Capaian Target	Ket
	Uraian	Indikator Kinerja	Sat	Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8
Sasaran Strategis 1: Terwujudnya ketersediaan administrasi perkantoran yang memadai dan berkualitas							
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah administrasi surat menyurat	lbr	100	100	100	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, listrik dan air	Bln	12	12	100	
	Penyediaan ATK dan jasa kebersihan kantor	Tersedianya ATK, terse-dianya jasa kebersihan kantor	Jenis	30 12	30 12	100	
	Penyediaan barang cetak & penggandaan	Tersedianya barang cetak & penggandaan	lbr	37.500	37.500	100	
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan	Tersedianya komponen listrik dan penerangan	Jenis	2	2	100	
	Penyediaan bahan bacaan & peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bln	1	1	100	
	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	Porsi	1100	1100	100	
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Tersedianya rapat koor-dinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Kali	15	16	106	

	Penyediaan jasa tenaga pendukung & teknis perkantoran	Jumlah tenaga/jasa pendukung teknis perkantoran	Org	1	1	100	
Sasaran Strategis 2 : Terwujudnya ketersediaan administrasi perkantoran yang memadai dan berkualitas							
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas & operasional, Pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	Jmlah kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara,	Unit	1	1	70	
		Jmlah kendaraan dinas/ operasional yang difasilitasi jasa perizinan		5	4	80	
	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung ktr	Terpeliharanya gedung kantor	Unit	1	1	100	
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	Jenis	14	14	100	
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	Jenis	12	12	100	
Sasaran Strategis 3: Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur melalui Diklat Teknis, Fungsional dan Diklat sesuai tugas fungsi							
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Penyelenggaraan dik lat teknis, fungsional dan kepemimpinan	Penyelenggaraan Diklat Teknis Fungsional dan Kepemimpinan	Org	6	6	100	
Sasaran Strategis 4 : Terwujudnya ketersediaan administrasi perkantoran yang memadai dan berkualitas							
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD	Jumlah laporan ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan OPD	Dok	7	7	100	
Sasaran Strategis 5 : Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur melalui Diklat Teknis, Fungsional dan Diklat sesuai tugas fungsi							
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi Calon PNS	Pendidikan & Pelatihan Prajabatan Golongan II dan III	CPNS	168	129	77	

Sasaran Strategis 6 : Meningkatnya Kualitas Penataan Aparatur

Program Kepegawaian Daerah	Penyusunan rencana pembinaan karier PNS	Jumlah dokumen penyusunan rencana pembinaan karier	Org/Dok	300	350	116	
Program Kepegawaian Daerah	Seleksi Penerimaan calon PNS	Jumlah Pengadaan PPPK	Org,	500	698	140	
		Jumlah Rencana Formasi Pegawai dan Pemetaan Jabatan yang disusun	Formasi	500	744	149	

Sasaran Strategis 7 : Terwujudnya peningkatan Disiplin aparatur

Program Kepegawaian Daerah	Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS	Jumlah Penyelesaian kasus pelanggaran disiplin PNSD	Kasus	20	21	105	
Program Kepegawaian Daerah	Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi	Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi	Org	20	20	100	

Sasaran Strategis 8 : Meningkatnya jenjang pendidikan ASN sesuai kebutuhan daerah

Program Kepegawaian Daerah	Pemberian bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas	Pemberian bantuan Tubel, Ibel dan Ikatan Dinas	Org	100	90	90	
----------------------------	--	--	-----	-----	----	----	--

Sasaran Strategis 9 : Terwujudnya layanan kepegawaian yang cepat dan akurat

Program Kepegawaian Daerah	Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala dan mutasi PNSD	Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat, berkala, inpasing dan PMK	Org	2.380	2.410	101, 2	
Program Kepegawaian Daerah	Penataan sistem administrasi aparatur purnabhakti/pensiun	Penataan sistem aparatur purnabhakti/pensiun	Org	150	239	159	
Program Kepegawaian Daerah	Pengumpulan, Pengolahan, penyajian data informasi kepegawaian	Pengumpulan, pengo-lahan dan penyajian data informasi kepegawaian	File	5.800	7.078	122	
Program Kepegawaian Daerah	Ujian dinas dan penyesuaian ijazah	Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah	Org	100	55	55	

Program Kepegawai an Daerah	Penataan sistem administrasi/proses penyesuaian karpeg, taspen &Karis/ Karsu	Jumlah sistem informasi administrasi proses/ penyesuaian Karpeg/ Taspen dan Karis/Karsu	Kartu	500	394	78,8	
-----------------------------------	---	--	-------	-----	-----	------	--

a. Program dan Kegiatan

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah merupakan Perangkat Daerah yang melaksanakan dua urusan, yaitu urusan Kepegawaian dan Urusan Pendidikan dan Pelatihan. Dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam RENSTRA Perangkat Daerah, maka pada Tahun Anggaran 2022, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Flores Timur melaksanakan 3 (tiga) program, 10(sepuluh) kegiatan dan 29 sub kegiatan dengan rincian, sebagai berikut :

Tabel 3.2. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Anggaran Tahun 2022

No	Nama Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	3.433.223.451
1	Perencanaan, Penganggaran & Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	67.629.000
1.1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	67.629.000
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.085.445.894
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.047.945.894
2.2	Pelaksanaan, Penatausahaan & Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	37.500.000
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	186.358.500
3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.000.000
3.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	39.998.500
3.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.000.000
3.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	900.000
3.5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	40.000.000

3.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	87.460.000
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	39.580.000
4.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000
4.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	28.980.000
4.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	9.600.000
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	54.210.057
5.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	45.310.057
5.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3.000.000
5.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3.000.000
5.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.900.000
II.	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	1.784.305.200
6	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	694.358.500
6.1	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	538.128.500
6.2	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	59.290.000
6.3	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	48.150.000
6.4	Pengelolaan Data Kepegawaian	48.790.000
7	Mutasi dan Promosi ASN	783.529.000
7.1	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	138.368.000
7.2	Pengelolaan Promosi ASN	645.161.000
8	Pengembangan Kompetensi ASN	214.622.700
8.1	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	33.750.000
8.2	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	145.137.700
8.3	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	35.735.000
9	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	91.795.000
9.1	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	47.385.000
9.2	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin PNS	44.410.000

III.	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	2.077.433.000
10	Sertifikasi, Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi dan Sumber Belajar	2.077.433.000
10.1	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, JPT, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan & Prajabatan	1.804.077.000
10.2	Pembinaan, Pengordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan SB dan Kerjasama serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, JPT, Kepemimpinan dan Prajabatan	273.356.000
	TOTAL BELANJA	7.294.961.651

b. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran untuk program dan kegiatan dapat digambarkan melalui tabel berikut ini :

Tabel 3.3. Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2022

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	
			Rp.	%
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	3.433.223.451	3.260.549.911	94,97
1	Perencanaan, Penganggaran & Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	67.629.000	67.628.888	100
1.1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	67.629.000	67.628.888	100
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.085.445.894	2.916.576.128	94,53
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.047.945.894	2.884.326.128	94,63
2.2	Pelaksanaan, Penatausahaan & Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	37.500.000	32.250.000	86,00
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	186.358.500	186.196.500	99,91
3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.000.000	2.986.000	99,53
3.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	39.998.500	39.998.500	100

3.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.000.000	15.000.000	100
3.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	900.000	900.000	100
3.5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	40.000.000	40.000.000	100
3.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	87.460.000	87.310.000	99,83
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	39.580.000	36.100.496	91,21
4.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000	994.000	99,40
4.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	28.980.000	25.506.496	88,01
4.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	9.600.000	9.600.000	100
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	54.210.057	54.049.899	99,70
5.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	45.310.057	45.198.899	99,75
5.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3.000.000	3.000.000	100
5.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3.000.000	2.959.000	98,63
5.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.900.000	2.892.000	99,72
II.	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	1.784.305.200	1.704.052.333	95,50
6	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	694.358.500	655.417.381	94,39
6.1	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	538.128.500	499.452.581	92,81
6.2	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	59.290.000	59.049.000	99,59
6.3	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	48.150.000	48.125.800	99,95
6.4	Pengelolaan Data Kepegawaian	48.790.000	48.790.000	100

7	Mutasi dan Promosi ASN	783.529.000	743.734.552	94,92
7.1	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	138.368.000	137.167.680	99,13
7.2	Pengelolaan Promosi ASN	645.161.000	606.566.872	94,02
8	Pengembangan Kompetensi ASN	214.622.700	213.358.400	99,41
8.1	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	33.750.000	33.720.400	99,91
8.2	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	145.137.700	144.293.000	99,42
8.3	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	35.735.000	35.345.000	98,91
9	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	91.795.000	91.542.000	99,72
9.1	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	47.385.000	47.382.000	99,99
9.2	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin PNS	44.410.000	44.160.000	99,44
III.	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	2.077.433.000	2.014.537.700	96,97
10	Sertifikasi, Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi dan Sumber Belajar	2.077.433.000	2.014.537.700	96,97
10.1	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, JPT, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan & Prajabatan	1.804.077.000	1.761.942.500	97,66
10.2	Pembinaan, Pengordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan SB dan Kerjasama serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, JPT, Kepemimpinan dan Prajabatan	273.356.000	252.595.200	92,41
	TOTAL BELANJA	7.294.961.651	6.979.139.944	95,67

Pencapaian Kinerja OPD dan realisasi anggaran serta presentase pencapaian kinerja dapat dirincikan, sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota merupakan program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan administrasi

perkantoran. Jumlah total dana Rp. 3.433.223.451,- dimana jumlah total realisasi sebesar Rp. 3.260.549.911,- dan persentase penyerapan anggaran sebesar 94,97%.

2. **Program Kepegawaian Daerah**, merupakan program yang bertujuan untuk mewujudkan manajemen Aparatur Sipil Negara yang profesional dan akuntabel. Jumlah dana yang dianggarkan sebesar Rp. 1.784.305.200,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.704.052.333,- atau persentase serapan sebesar 95,50%.
3. **Program Pengembangan Sumber Daya Manusia**. Tujuan program ini adalah mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang berkualitas dan berkompeten di bidang tugasnya. Jumlah dana yang dianggarkan sebesar Rp. 2.077.433.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.014.537.700,- atau persentase serapan sebesar 96,97%.

c. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

Pelaksanaan Program dan Kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Flores Timur selama Tahun Anggaran 2022 telah disesuaikan dengan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana termuat dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Flores Timur Tahun 2022. Berikut adalah tabel yang menggambarkan kesesuaian antara Program RKPD TA 2022 dan DPPA Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Flores Timur TA 2022.

**Tabel 3.4. Kesesuaian Program RKPD dan Program DPPA
Tahun 2022**

No	PROGRAM RKPD	No	PROGRAM DPPA
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2	Program Kepegawaian Daerah	2.	Program Kepegawaian Daerah
3	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	3.	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

d. Realisasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022

1. Program dan Kegiatan

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Flores Timur melaksanakan urusan wajib Kepegawaian yang dijabarkan dalam 3 (dua) program, 10 (sepuluh) kegiatan dan 29 (dua puluh sembilan) sub kegiatan, yang rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.5. Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Wajib Kepegawaian

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
II.	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	1.784.305.200	1.704.052.333	95,50
6	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	694.358.500	655.417.381	94,39
6.1	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	538.128.500	499.452.581	92,81
6.2	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	59.290.000	59.049.000	99,59
6.3	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	48.150.000	48.125.800	99,95
6.4	Pengelolaan Data Kepegawaian	48.790.000	48.790.000	100
7	Mutasi dan Promosi ASN	783.529.000	743.734.552	94,92
7.1	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	138.368.000	137.167.680	99,13
7.2	Pengelolaan Promosi ASN	645.161.000	606.566.872	94,02
8	Pengembangan Kompetensi ASN	214.622.700	213.358.400	99,41
8.1	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	33.750.000	33.720.400	99,91
8.2	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	145.137.700	144.293.000	99,42
8.3	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	35.735.000	35.345.000	98,91
9	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	91.795.000	91.542.000	99,72
9.1	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	47.385.000	47.382.000	99,99
9.2	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin PNS	44.410.000	44.160.000	99,44
III.	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	2.077.433.000	2.014.537.700	96,97
10	Sertifikasi, Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi dan Sumber Belajar	2.077.433.000	2.014.537.700	96,97
10.1	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, JPT, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan & Prajabatan	1.804.077.000	1.761.942.500	97,66

10.2	Pembinaan, Pengordinasian, Fasilitas, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan SB dan Kerjasama serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, JPT, Kepemimpinan dan Prajabatan	273.356.000	252.595.200	92,41
	TOTAL BELANJA	7.294.961.651	6.979.139.944	95,67

2. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Pelaksanaan Program dan Kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

a. Program Kepegawaian Daerah

Anggaran yang tersedia untuk Program Kepegawaian Daerah adalah sebesar **Rp. 1.784.305.200,-** dan yang dapat direalisasikan adalah sebesar **Rp. 1.704.052.333,-** atau **95,50%**. Adapun rincian realisasi kegiatan adalah sebagai berikut :

Program ini diimplementasikan dalam 4 (empat) kegiatan dan 11 (sebelas) sub kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN

a) Sub Kegiatan : Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN

Untuk Tahun 2022 kegiatan Pelaksanaan Pengadaan ASN diawali dengan :

1. Penetapan Formasi

Penetapan Formasi CASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Flores Timur melalui Keputusan Menpan RB Nomor 843 Tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.6. Daftar Alokasi Formasi CASN Tahun 2022

ASN	ALOKASI FORMASI
CPNS	-
PPPK Fungsional Non Guru	379
PPPK Fungsional Guru	319
TOTAL ALOKASI	698

2. Pendaftaran dan Seleksi Administrasi

Pelaksanaan untuk pendaftaran dan seleksi administrasi :

1. Pendaftaran CASN Guru

No	Kegiatan	Jadwal
1	Pengumuman Seleksi	31 Oktober 2022
2	Pendaftaran Seleksi (untuk semua pelamar)	31 Oktober s.d 13 November 2022
3	Seleksi Administrasi	31 Oktober s.d 15 November 2022
4	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi (untuk P1,P2,P3 dan Pelamar Umum)	16 s.d 17 November 2022
5	Masa Sanggah	18 s.d 20 November 2022
6	Jawab Sanggah	21 s.d 24 November 2022
7	Pengumuman Pasca Sanggah	26 November 2022
8	Penilaian Kesesuaian Oleh Pengawas, Kepala Sekolah dan Guru Senior	27 s.d 28 November 2022
9	Penilaian Kesesuaian oleh Dinas Pendidikan dan BKPSDM	29 November s.d 3 Desember 2022
10	Pengolahan Hasil Penilaian Kesesuaian	3 s.d 13 Desember 2022
11	Pengumuman dan Pemilihan Formasi (untuk Pelamar Umum)	14 s.d 18 Desember 2022
12	Pengumuman Daftar Peserta Waktu dan Tempat Seleksi (untuk pelamar umum)	13 s.d 15 Januari 2023
13	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi (untuk pelamar umum)	16 s.d 21 Januari 2023
14	Pengolahan Hasil Seleksi (untuk pelamar umum)	21 Januari s.d 1 Februari 2023
15	Pengumuman Hasil Seleksi (untuk P1,P2,P3 dan Pelamar umum)	2 s.d 3 Februari 2023
16	Masa Sanggah	4 s.d 6 Februari 2023
17	Jawab Sanggah	7 s.d 13 Februari 2023
18	Pengumuman Kelulusan Pasca Sanggah	20 s.d 21 Februari 2023
19	Pengisian DRH NI PPPK	22 Februari s.d 13 Maret 2023
20	Usul Penetapan NI PPPK	7 s.d 31 Maret 2023

2. Pendaftaran CASN Tenaga Kesehatan

No	Kegiatan	Jadwal
1	Pengumuman Seleksi	3 s.d 17 November 2022
2	Pendaftaran Seleksi	3 s.d 22 November 2022
3	Seleksi Administrasi	3 s.d 23 November 2022
4	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	24 s.d 25 November 2022
5	Masa Sanggah	25 s.d 27 November 2022
6	Jawab Sanggah	25 s.d 28 November 2022
7	Pengumuman Pasca Sanggah	29 November 2022
8	Penarikan Data Final	30 November s.d 1 Desember 2022
9	Penjadwalan Seleksi Kompetensi	2 s.d 3 Desember 2022
10	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat Seleksi	4 s.d 5 Desember 2022
11	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	6 s.d 20 Desember 2022
12	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi tambahan	19 s.d 23 Desember 2022
13	Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi	11 s.d 27 Desember 2022
14	Pengumuman Kelulusan	28 s.d 29 Desember 2022
15	Masa Sanggah	29 s.d 31 Desember 2022
16	Jawab Sanggah	29 Desember 2022 s.d 4 Januari 2023
17	Pengumuman Kelulusan Pasca Sanggah	5 s.d 6 Januari 2023
18	Pengisian DRH NI PPPK	7 s.d 31 Januari 2023
20	Usul Penetapan NI PPPK	1 s.d 28 Februari 2023

3. Pendaftaran CASN Tenaga Teknis

No	Kegiatan	Jadwal
1	Pengumuman Seleksi	23 Desember 2022 s.d 3 Januari 2023
2	Pendaftaran Seleksi	21 Desember 2022 s.d 6 Januari 2023
3	Seleksi Administrasi	21 Desember 2022 s.d 11 Januari 2023

4	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	12 s.d 15 Januari 2023
5	Masa Sanggah	16 s.d 18 Januari 2023
6	Jawab Sanggah	19 s.d 25 Januari 2023
7	Pengumuman Pasca Sanggah	26 s.d 28 Januari 2023
8	Pemilihan titik Lokasi Ujian dan Pencetakan kartu peserta	18 s.d 22 Februari 2023
9	Penarikan Data Final	23 s.d 24 Februari 2023
10	Penjadwalan Seleksi Kompetensi	25 Februari s.d 1 Maret 2023
11	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat Seleksi	2 s.d 7 Maret 2023
12	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	10 Maret s.d 3 April 2023
13	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi tambahan	20 Maret s.d 6 April 2023
14	Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi	26 Maret s.d 8 April 2023
15	Pengumuman Kelulusan	9 s.d 11 April 2023
16	Masa Sanggah	12 s.d 14 April 2023
17	Jawab Sanggah	14 s.d 20 April 2023
18	Pengumuman Kelulusan Pasca Sanggah	27 s.d 29 April 2023
19	Pengisian DRH NI PPPK	30 April s.d 22 Mei 2023
20	Usul Penetapan NI PPPK	23 Mei s.d 20 Juni 2023

Tabel 3.7. Jumlah Pelamar Seleksi Administrasi CASN Tahun 2022

ASN	Jumlah Pelamar	Seleksi Administrasi	
		MS	TMS
CPNS	-	-	-
PPPK Fungsional Non Guru	897	848	83
PPPK Fungsional Guru	630	629	1
TOTAL	1.527	1.477	84

3. Pelaksanaan Seleksi

Pelaksanaan Seleksi untuk masing-masing kategori CASN (Guru, Medis dan Teknis) sesuai dengan jadwal. Pada Tahun 2022 hanya terselenggara CASN tenaga Guru dan Tenaga Kesehatan. Sedangkan Untuk Tenaga Teknis akan dilaksanakan pada tahun 2023

a. Penetapan NI PPPK

Tabel 3.8. Kelulusan Seleksi CASN Tahun 2022

CASN	JUMLAH LULUS
CPNS	-
PPPK Fungsional Non Guru	190
PPPK Fungsional Guru	-
TOTAL	190

Pelaksanaan Penetapan NI PPPK untuk tenaga Kesehatan dimulai tanggal 1 s.d 28 Februari 2023, tenaga guru dimulai tanggal 7 s.d 31 Maret 2023 dan yang tenaga Teknis dilaksanakan mulai tanggal 23 Mei s.d 20 Juni 2023 sesuai jadwal.

b) Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian

Target kinerjanya adalah terlaksananya proses administrasi bagi PNS yang memasuki masa purnabakti/pensiun (baik BUP, maupun janda duda) sebanyak 150 orang. Realisasinya di Tahun 2022 adalah terlayannya sebanyak 239 orang pensiunan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.9. Rekapitulasi pelayanan MPP dan Pensiun

Tahun 2022

No.	Uraian	Jumlah
1.	SK Pensiun karena memasuki Batas Usia Pensiun (BUP)	200
2.	SK Pensiun Janda/Duda	39
3.	SK Pensiun Anumerta	-
4.	SK Pemberhentian atas Permintaan Sendiri	-
	Jumlah	239

Jadi pada tahun 2022 realisasi pelayanan administrasi bagi PNS yang mengalami purnabakti sebanyak 239 orang (159%).

c) Sub Kegiatan : Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian

Kegiatan penyajian data dan informasi ASN merupakan kegiatan yang berkaitan erat dengan pengolahan dan penyajian data ASN dengan beberapa butir kegiatan antara lain:

1. Melakukan update data kepegawaian pada sistem aplikasi yang digunakan dalam manajemen kepegawaian seperti SAPK.
2. Melakukan update data Kepegawaian pada Database lokal kepegawaian.
3. Mengelolah kearsipan dokumen kepegawaian ASN.
4. Melakukan penyajian data ASN berupa Data Bulanan dan 1 (satu) Tahun.

Secara keseluruhan hasil kegiatan penyajian data dan informasi ASN diuraikan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.10. Daftar Update, Peremajaan dan Penyajian Data Tahun 2022

No.	Butir Kegiatan	Volume
1.	Update Database Data Pangkat	993 Data
2.	Update Database Data JPT, Administrator dan Pengawas serta Kepala UPTD	82 Data
3.	Update Database Data Jabatan Fungsional	610 Data
4.	Update Database Data CPNS	129 Data
5.	Peremajaan Data pada SAPK untuk JPT, Administrator dan Pengawas serta Kepala UPTD	82 Data
6.	Peremajaan Data pada SAPK untuk Jabatan Fungsional	610 Dokumen
7.	Penyajian Data ASN Bulanan	1 file data
8.	Penyajian Rekap Data ASN Bulanan	1 file data
9.	Penyajian Data ASN 1 (satu) Tahun	1 file data
10.	Penyajian Rekap Data ASN 1 (satu) Tahun	1 file data
11.	Peremajaan data Unor	1 file data

Akurasi data kepegawaian merupakan kelengkapan dan kebenaran komponen data pegawai. Jika salah satu komponen data seorang pegawai tidak lengkap atau tidak benar, maka data tersebut dinyatakan tidak akurat. Data kepegawaian yang akurat diperlukan sebagai bahan perencanaan manajemen kepegawaian dan dapat digunakan untuk pengambilan kebijakan dalam pengembangan dan

pembinaan PNS. Untuk itu dalam rangka melaksanakan kebijakan pengembangan sistem database kepegawaian, melaksanakan peningkatan kualitas pengelolaan dokumentasi dan melalui pengelolaan, pemeliharaan dan penyimpanan arsip kepegawaian secara manual.

Target kinerjanya adalah tersajinya data dari 5.800 file PNS Kabupaten Flores Timur. Realisasinya adalah pada tahun 2022, tersaji data kepegawaian untuk 7.078 file PNS (122%).

Adapun gambaran pengelolaan data kepegawaian yang merupakan inti pelayanan pada pos kegiatan ini selama tahun 2022 dapat dilihat sebagai berikut

a. Data Nominatif PNS lingkup Pemerintah Kabupaten Flores Timur

Jumlah Pegawai Negeri Sipil lingkup Pemerintah Kabupaten Flores Timur Tahun 2022 keadaan 31 Desember 2022 mencapai 4.549 orang dan PPPK sebanyak 343 orang.

Tabel 3.11. Jumlah ASN berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2022

PNS		PPPK	
Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
1920	2629	146	197

Tabel 3.12. Jumlah ASN berdasarkan Golongan Tahun 2022

PNS					PPPK		
No	Golongan	Jenis Kelamin		Jmlh	Jenis Kelamin		Jmlh
		Laki-laki	Perempuan		Laki-laki	Perempuan	
1	Gol. I	16	5	21			
2	Gol. II	372	430	802			
3	Gol. III	1145	1925	3070			
4	Gol. IV	387	269	656			
Total		1920	2629	4549			

Tabel 3.13. Jumlah ASN berdasarkan Pendidikan Tahun 2022

PNS					PPPK		
No	Golongan	Jenis Kelamin		Jmlh	Jenis Kelamin		Jmlh
		Laki-laki	Perempuan		Laki-laki	Perempuan	
1	SD	16	4	20	-	-	-
2	SLTP	29	3	32	-	-	-
3	SLTA	433	342	775	-	-	-
4	D.I	3	30	33	-	-	-
	D.II	78	46	124	-	-	-
	D.III	201	750	951	3	6	9
5	S.1	1105	1445	2550	143	191	334
6	S.2	46	17	63	-	-	-
7	S.3	1	-	1	-	-	-
Total		1912	2637	4549	146	197	343

Tabel 3.14. Jumlah ASN berdasarkan Agama Tahun 2022

PNS					PPPK		
No	Agama	Jenis Kelamin		Jmlh	Jenis Kelamin		Jmlh
		Laki-laki	Perempuan		Laki-laki	Perempuan	
1	Islam	217	339	556			
2	Katolik	1640	2187	3827			
3	Kristen	60	99	159			
4	Hindu	3	4	7			
5	Budha	-	-	-			
Total		1920	2629	4549			

b. Data Jabatan Struktural

Tabel 3.15. Data Jabatan Struktural menurut Jabatan, Jumlah Jabatan, Jabatan Terisi, Jabatan Lowong Keadaan 31 Desember Tahun 2022

No	Jabatan	Eselon	Jumlah Jabatan	Terisi	Lowong
1	JPT	Ila	1	-	1
		IIb	35	30	5
	Jumlah 1		36	30	6
2	Administator	IIIa	63	58	5
		IIIb	114	108	6
	Jumlah 2		177	166	11
3	Pengawas	IVa	206	169	37
		IVb	115	169	46
	Jumlah 3		321	238	83
Total			534	434	100

Tabel 3.16. Data Jabatan Struktural Kabupaten Flores Timur yang terisi menurut Jabatan dan Jenis Kelamin Keadaan 31 Desember 2022

No	Jabatan		Jenis Kelamin		Jumlah
			Laki-laki	Perempuan	
1	JPT	Ila	-	-	-
		IIb	28	2	30
	Jumlah 1		28	2	30
2	Administator	IIIa	53	5	58
		IIIb	87	21	108
	Jumlah 2		140	26	166
3	Pengawas	IVa	94	75	169
		IVb	36	33	69
	Jumlah 3		130	108	238
Total			298	136	434

d) Sub Kegiatan : Pengelolaan Data Kepegawaian

Target kinerjanya adalah terpenuhinya PNS yang memiliki administrasi kepegawaian yang lengkap dalam hal ini berupa administrasi Karpeg, Karis / Karsu dan Taspen serta cuti sebanyak 500 kartu. Realisasinya sebanyak 394(79%) yang diproses dengan rinciannya sebagai berikut:

Tabel 3.17. Rekapitulasi Pelayanan Karpeg, Taspen dan Karis/Karsu Tahun 2022

No	Jenis Usulan	Jumlah Usul	Sudah diproses	Belum Proses
1.	Penerbitan Karpeg	-	-	-
2.	Penerbitan Karis	27	27	-
3.	Penerbitan Karsu	27	27	-
4.	Penerbitan Taspen	340	340	-
	Jumlah	394	394	-

Selain melaksanakan tugas pengurusan karpeg, taspen dan karis/karsu, pada kegiatan ini juga melekat berbagai sub kegiatan tambahan yang menjadi tupoksi BKPSDMD dalam melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian. Adapun sub kegiatan tambahannya berupa mengurus mutasi gaji/berkala PNS Pemerintah kabupaten Flores Timur. Adapun realisasi pelaksanaan tugasnya sebagai berikut :

Tabel 3.18. Rekapitulasi Pengurusan Mutasi Gaji/berkala Tahun 2022

No	Waktu (TMT)	Jumlah
1	Januari	527
2	Februari	193
3	Maret	258
4	April	62
5	Mei	4
6	Juni	32
7	Juli	13
8	Agustus	10
9	September	15
10	Oktober	71
11	November	11
12	Desember	221
	TOTAL	1417 SK

2. Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN

a) Sub Kegiatan : Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN

Target kinerjanya adalah terwujudnya administrasi kepegawaian yang meliputi kenaikan pangkat, inpassing, kenaikan gaji berkala dan Penyesuaian Masa Kerja bagi 2.380 orang PNS Daerah. Realisasinya sebanyak total 2.410 orang dengan diprosesnya usulan kenaikan pangkat sebanyak 993 berkas, Kenaikan Gaji Berkala sebanyak 1.417 berkas dan Mutasi PNS sebanyak 63 berkas dan tingkat capaiannya 93%.

Realisasinya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.19. Realisasi Pengurusan Mutasi Pangkat PNSD

Tahun 2022

No	Uraian	Usulan	BTL/TMS	Disetujui/MS	Ket
1	Kenaikan Pangkat April	510	7	503	
2	Kenaikan Pangkat Oktober	483	11	472	
	Total	993	18	975	

Dilihat dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2022 usulan kenaikan pangkat yang tidak dapat diproses atau dikenal dengan istilah BTL/TMS lebih sedikit dibandingkan tahun 2021. Alasan Batal (BTL) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS) adalah : Lebih Banyak pada nilai SKP (Sasaran Kerja Pegawai) yang kurang.

Selain melaksanakan tugas pengurusan mutasi kepangkatan, pada kegiatan ini juga melekat berbagai sub kegiatan tambahan yang menjadi tupoksi BKPSDMD dalam melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian. Adapun sub kegiatan tambahannya berupa pengurusan mutasi baik mutasi antar OPD termasuk mutasi keluar/masuk Pemerintah kabupaten Flores Timur. Adapun realisasi pelaksanaan tugasnya sebagai berikut:

Tabel 3.20. Rekapitulasi Rekomendasi Pindah Keluar, Pindah Masuk, Mutasi antar OPD Tahun 2022

No	Uraian Sub kegiatan	Jumlah	Ket
1	Mutasi PNS antar OPD lingkup Pemkab Flotim - SK Mutasi Kerja	64	
2	Rekomendasi Pindah Masuk	7	
3	Rekomendasi Pindah Keluar	18	
	TOTAL	89 SK	

b) Sub Kegiatan : Pengelolaan Promosi ASN

Target kinerjanya adalah jumlah jabatan yang terisi sesuai kebutuhan jabatan yang lowong sebanyak 300 orang. Realisasinya adalah sepanjang tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Pelaksanaan Uji Kompetensi Pimpinan Tinggi Pratama Lingkup Pemerintah Kabupaten Flores Timur Tahun 2022, dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2022 atas 13 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama. Jadwal Pelaksanaan Seleksi tersebut diselenggarakan dari tanggal 15 Desember sampai dengan tanggal 21 Desember 2022. Jabatan Pimpinan tinggi Pratama yang dilakukan Uji Kompetensi adalah sebagai berikut :

- Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan
- Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
- Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
- Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
- Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
- Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
- Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- Kepala Dinas Perhubungan
- Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
- Kepala Dinas Sosial
- Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan

2. Pelaksanaan Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Lingkup Pemerintah Kabupaten Flores Timur Tahun 2022, atas 2 (dua) jabatan yang lowong. Jadwal Pelaksanaan Seleksi tersebut diselenggarakan dari tanggal 23 Februari sampai dengan tanggal 7 Maret 2022. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama tersebut adalah :

- a. Jabatan Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga
- b. Jabatan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Jumlah peserta Managerial sebanyak : 9 orang.

Jumlah peserta Bidang sebanyak : 9 orang.

3. Rekapitulasi Pelantikan Pejabat Struktural, JPTP, Administartor dan Pengawas sampai dengan bulan Desember 2022 sebanyak 3 kali. Adapun rinciannya sebagai berikut :

**Tabel 3.21. Daftar Pelantikan Pejabat Struktural JPTP,
Administrator & Pengawas Tahun 2022**

No	Tgl Pelantikan	Nama Jabatan	Eselon	Jumlah
1	21 Maret 2022	JPTP	II.b	2 orang
2	13 Mei 2022	Administrator	III.a	20 orang
		Administrator	III.b	13 orang
		Pengawas	IV.a	43 orang
		Pengawas	IV.b	4 orang
	Jumlah			82 orang

4. Sedangkan Rekapitulasi Pemberhentian dan Pengangkatan Pengawas Sekolah, Kepala UPT Dinas Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama sampai dengan keadaan Desember 2022 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.22. Daftar Pengangkatan Pengawas Sekolah, Ka.UPTD Satuan Pendidikan Formal
SD & SMP Lingkup Pemerintah Kabupaten Flores Timur Tahun 2022**

No	Tgl Pelantikan	Nama Jabatan	Jumlah
1.	18 Mei 2022	Pengawas Sekolah	- orang
		Kepala UPTD Satuan Pendidikan Formal SMP	27 orang
		Kepala UPTD Satuan Pendidikan Formal SD	76 orang
		JUMLAH	103 orang

Pemberhentian dari tugas tambahan sebagai kepala sekolah sebanyak 24 Orang. Selain mengurus pelantikan pejabat struktural, anggaran dalam kegiatan ini juga digunakan untuk mengurus jabatan fungsional yang ada di Kabupaten Flores Timur mulai dari pengangkatan pertama kali dalam jabatan fungsional hingga perpindahan jabatan fungsional. Adapun rekapan selama tahun 2022 dapat ditampilkan sebagai berikut:

Tabel 3.23. Daftar Rekapitulasi Mutasi dalam Jabatan Fungsional Tahun 2022

No	Jenis Mutasi	Jumlah	Ket
1	Penyetaraan Jabatan dari Administratif ke dalam Jabatan Fungsional	-	
2	Pengangkatan Pertama Kali	165 orang	
3	Pengangkatan Kembali	11 orang	
4	Kenaikan/Perpindahan Jabatan	402 orang	
5	Pemberhentian dari Jabatan Fungsional	17 orang	
6	Penyesuaian Tunjangan Jabatan	15 Orang	
	Total	610 orang	

3. Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN

Sub Kegiatan : Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN

Target kinerja adalah Terlaksananya Ujian Dinas baik Ujian Dinas Tk.I, Ujian Dinas Tk.II, dan Ujian Penyesuaian Ijasah Bagi PNS lingkup Pemerintah Kabupaten Flores Timur dengan jumlah peserta sebanyak 100 orang. Realisasinya adalah terlaksananya Ujian Dinas Tingkat I dan ujian Penyesuaian Ijasah sebanyak 2 (dua) kali pelaksanaan kegiatan dengan pembebanan pada Anggaran BKPSDMD Kabupaten Flores Timur, dengan jumlah peserta 55 (55%). Berikut gambaran realisasi peserta kegiatan ini dari masing-masing tingkatan :

Tabel 3.24. Rekap Peserta Ujian Dinas & Penyesuaian Ijasah Tahap I Tahun 2022

No	JENIS UJIAN	JUMLAH USULAN	HADIR (Mengikuti Ujian)	Keterangan
1.	UJIAN DINAS	26	25	1. 1 Peserta Ujian Dinas Tingkat I, TMS. 2. Peserta yang hadir semuanya lulus dan sudah memperoleh Sertifikat.
	Tingkat I	19	18	
	Tingkat II	7	7	
2.	PENYESUAIAN IJAZAH	14	14	
	S1	11	11	
	D3	-	-	

	D2	-	-	
	SLTA-PAKET C	2	2	
	SLTP-PAKET B	1	1	
	TOTAL	40	39	

Tabel 3.25. Rekap Peserta Ujian Dinas & Penyesuaian Ijazah Tahap II Tahun 2022

No	JENIS UJIAN	JUMLAH USULAN	HADIR (Mengikuti Ujian)	Keterangan
1.	UJIAN DINAS	6	6	1. Peserta yang hadir semuanya lulus 2. 1 Peserta Ujian PI tidak hadir.
	Tingkat I	3	3	
	Tingkat II	3	3	
2.	PENYESUAIAN IJAZAH	9	8	
	S1	8	7	
	D3	-	-	
	D2	-	-	
	SLTA-PAKET B	-	-	
	SLTP-PAKET B	1	1	
	TOTAL	15	14	

a) Sub Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN

Dalam rangka meningkatkan pengetahuan, kecakapan dan keterampilan serta mengembangkan kepribadian aparatur yang lebih baik, Pemerintah Kabupaten Flores Timur memberikan kesempatan kepada seluruh PNS untuk melanjutkan pendidikannya baik melalui sistem Ijin Belajar maupun Tugas Belajar. Sasaran utamanya adalah seluruh PNS lingkup Pemerintah Kabupaten Flores Timur. Pendasaran kegiatan ini adalah sesuai Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 8 Tahun 20022 tentang Tugas Belajar bagi PNS Daerah. Pada tahun 2022 ini. Target kinerjanya adalah meningkatkan jenjang pendidikan PNS dengan melayani semua proses kepegawaian menyangkut permohonan Tugas Belajar, Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil maupun Ikatan Dinas sebanyak 100 orang. Realisasinya adalah terbantunya administrasi bagi 90 orang mahasiswa PNS (90%) yang dirinci sebagai berikut:

Tabel 3.26 Jumlah Mahasiswa Tubel, Ibel dan Ikatan Dinas Tahun 2022

No.	Bidang Minat/Kompetensi	Tugas Belajar	Ijin Belajar	Ikatan Dinas
1.	Tenaga Kesehatan	21	-	-
2.	Tenaga Guru	-	7	-
3.	Tenaga Teknis Lainnya	12	50	-
	Jumlah	33	57	-

3. Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

a) Sub Kegiatan : Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan penghargaan/reward bagi PNS yang menunjukkan prestasi dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya. Adapun untuk mencapai target kegiatan ini, sebelumnya melewati tahapan uji petik di lapangan sebelum diusulkan untuk mendapatkan penghargaan Satya Lancana Karya Satya (SLKS) dari Presiden Republik Indonesia. Kegiatan Pemberian Satya Lancana Karya Satya bagi PNS merupakan salah satu upaya Pemerintah Daerah untuk memberikan penghargaan kepada PNS yang telah menunjukkan pengabdian, kesetiaan, kejujuran, kecakapan, kedisiplinan dan loyalitas dalam melaksanakan tugas sehari-hari dengan 3 (tiga) jenis penghargaan yaitu bagi PNS yang memiliki masa kerja 10, 20 dan 30 tahun. Satya Lancana Karya Satya adalah Tanda Kehormatan yang diberikan oleh Presiden Republik Indonesia, seperti tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan. Penghargaan tersebut diharapkan dapat memacu semangat, motivasi dan dedikasi kinerja PNS, serta menimbulkan kebanggaan karena pengabdian mereka dihargai oleh negara. Lebih jauh, PNS yang menerima penghargaan ini seyogyanya menjadi teladan dan panutan bagi rekan-rekan PNS di lingkungan SKPD mereka masing-masing. Tahun 2022 sebanyak 20 orang PNS yang mendapatkan penghargaan SLKS yang dapat dirincikan sebagai berikut :

Tabel 3.27. Daftar Rincian Jumlah Penerima Penghargaan SLKS Tahun 2022

No.	Uraian	Jumlah Penerima Penghargaan SLKS
1.	Tanda Kehormatan SLKS 30 Tahun	5 orang
2.	Tanda Kehormatan SLKS 20 Tahun	10 orang
3.	Tanda Kehormatan SLKS 10 Tahun	5 orang
	Jumlah	20 orang

Selain menerima penghargaan berupa tanda kehormatan Satya Lancana Karya Satya, para PNS penerima penghargaan juga diberikan hadiah tambahan yang berupa uang sebesar masing-masing Rp. 1.000.000,-. Pemberian ini diharapkan mampu memacu para PNS untuk meningkatkan kinerja dan pengabdianya. Pemilihan penerima tanda penghargaan ini pun juga melewati tahapan seleksi yang dilakukan dan juga untuk membuktikan kinerja PNS yang bersangkutan maka juga dilakukan uji petik baik terhadap yang bersangkutan sendiri, juga terhadap atasan langsung dan masyarakat umum.

b) Sub Kegiatan : Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin PNS

Sesuai amanat PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS, maka BKPSDMD sebagai lembaga yang memiliki fungsi untuk melaksanakan pembinaan pegawai, berorientasi pada upaya untuk meningkatkan kepatuhan dan kesadaran PNS terhadap peraturan disiplin dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi dan pelaksanaan pemerintahan yang baik (good governance) melalui pengukuran persentase penanganan terhadap kasus pelanggaran disiplin PNS.

Target kinerjanya adalah penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS baik tingkat ringan, sedang maupun berat sebanyak 20 kasus. Realisasinya adalah selama tahun 2022 terlaksananya penanganan kasus pelanggaran disiplin PNS sebanyak 21 kasus (105%) dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.28. Tabel Penanganan Kasus Pelanggaran Disiplin PNS Tahun 2022

No.	Jumlah Kasus Pelanggaran Disiplin PNS	Keterangan
1	12 Kasus PNS	11 Kasus Pembinaan Internal Oleh Atasan Langsung 1 kasus dalam proses Pemeriksaan Inspektorat
2	3 Kasus PNS	3 Kasus PNS diberhentikan sementara

3	1 Kasus PNS	1 Kasus PNS dijatuhkan Hukuman Disiplin berupa Pemberhentian dari Jabatan
4	1 Kasus PNS	1 Kasus PNS yang diberhentikan dengan hormat karena tidak masuk kerja
	Sub Total	17 PNS
No.	Jumlah PNS yang Tersangkut kasus Tindak Pidana Korupsi	Keterangan
1.	4 PNS	4 PNS dikenakan Penjatuhan Sanksi Administratif Kepegawaian
	Sub Total	4 PNS
	TOTAL	21 PNS

b. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

Anggaran yang tersedia untuk Program Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah sebesar Rp. 2.077.433.000,- dan yang dapat direalisasikan adalah sebesar Rp. 2.014.537.700,- atau 96,97%. Adapun rincian realisasi kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional

a) Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan

Target kinerjanya adalah pendidikan dan pelatihan prajabatan golongan II dan III dan realisasinya adalah terlaksananya kegiatan Diklat Prajabatan Golongan II dan III di Kupang bagi 129 CPNS (77%).

Kegiatan Latsar CPNS Pemkab Flores Timur untuk Tahun Anggaran 2022 secara umum berjalan baik tanpa ada hambatan. Peserta Latsar Tahun 2022 sebanyak 129 orang dengan rincian Golongan II sebanyak 38 orang dan Golongan III sebanyak 91 orang. Pelaksanaan kegiatan terjadi pada awal Mei s.d Agustus tahun 2022. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang

b) Sub Kegiatan : Pembinaan, Pengordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar dan Kerjasama serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan

Pemerintah Kabupaten Flores Timur telah mengirimkan peserta Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) sebanyak 6 (enam) orang.

Kegiatan berjalan lancar tanpa ada kendala apapun. Peserta PIM III untuk tahun 2022 berjumlah 6 orang. Dari 6 orang ini proses pelaksanaannya terjadi dalam 1 gelombang dengan 6 peserta. Tempat pelaksanaan kegiatan juga terjadi pada Kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.

Tabel 3.29. Daftar Nama Peserta Pim Tingkat III Kab. Flores Timur Tahun 2022

No	Nama	Jabatan/Instansi	Keterangan
1	Simon Soge Makin, S.Si	Sekretaris Dinas PKO	Gelombang I
2	Yordanus Hoga Daton, SH, MH	Kabag Hukum Setda	Gelombang I
3	Oktavianus Taka Lawa, SE	Kabag Umum Setda	Gelombang I
4	Cyprianus Gaspar Rendra Tukan, S.Pd	Kabag Kesra Setda	Gelombang I
5	Gabriel Regi Tukan, SH	Kabag PEM Setda	Gelombang I
6	Emanuel Corebima, SE	Camat Titehena	Gelombang I

Namun di sisi lain ada beberapa hambatan internal yang kiranya sering menjadi kendala pada kegiatan ini, yakni :

1. Kabupaten Flores Timur belum memiliki badan diklat berakreditasi sesuai persyaratan untuk penyelenggaraan diklat sehingga peserta diklat dari Kabupaten Flores Timur harus mengikuti kegiatan di lembaga lain yang terakreditasi.
2. Kuota peserta dari lembaga diklat sangat terbatas sehingga masih banyak pejabat yang belum mengikuti kegiatan ini.
3. Anggaran yang dibutuhkan sangat besar sehingga menjadi beban anggaran pada BKPSDMD Kabupaten Flores Timur termasuk untuk mentor/pembimbing dari peserta Diklat Pim.

Untuk mengatasi kendala-kendala ini sehingga kegiatan diklat berjalan lebih baik kedepannya, maka ada beberapa langkah strategis yang disiapkan antara lain:

1. Penambahan anggaran yang lebih agar kuota peserta meningkat.
2. Penyusunan Rencana Pengembangan Kompetensi Aparatur bagi Aparatur Sipil Negara lingkup Pemerintah Kabupaten Flores Timur.

3. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

Berbagai masalah atau hambatan yang dihadapi untuk optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan Program dan Kegiatan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Flores Timur adalah sebagai berikut :

- 1) Sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan Program dan Kegiatan yaitu Printer yang masa penggunaannya relatif singkat (cepat rusak) karena tingginya beban pekerjaan sehingga menghambat penyelesaian pekerjaan.
- 2) Terbatasnya anggaran yang dialokasikan untuk Kepentingan peningkatan kompetensi teknis Pegawai Negeri Sipil melalui Pendidikan dan Pelatihan.
- 3) Dukungan dari OPD/instansi yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan di bidang kepegawaian masih belum maksimal sehingga kadang menghambat pada proses administrasi berikutnya.
- 4) Tingkat kedisiplinan para pegawai yang masih rendah.
- 5) Belum tersusunnya standar kompetensi jabatan secara menyeluruh.
- 6) Maraknya kasus pelanggaran disiplin oleh PNS, termasuk pelanggaran pidana yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil.
- 7) Masih rendahnya tingkat pemahaman regulasi kepegawaian terutama oleh pengelola kepegawaian dari setiap OPD yang menyebabkan terhambatnya pengurusan hak-hak kepegawaian yang merugikan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

b. Solusi

Untuk mengatasi hambatan dan masalah tersebut diatas diperlukan upaya-upaya penanggulangan antara lain sebagai berikut:

- 1) Peningkatan mutu dan jumlah sarana dan prasarana kebutuhan kantor untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas .
- 2) Meningkatkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan OPD lain yang terkait baik di Pusat, maupun di Regional X Denpasar, termasuk perubahan regulasi.
- 3) Membina dan meningkatkan fungsi koordinasi dan komunikasi yang baik dengan OPD lainnya dalam menata manajemen kepegawaian di daerah.
- 4) Peningkatan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan baik teknis / fungsional maupun kepemimpinan dengan maksud untuk menambah pengetahuan, kemampuan dan wawasan pegawai dalam meningkatkan

pelayanan serta terbinanya administrasi yang tepat orang, tepat waktu, tepat kualitas dan tepat kuantitas.

- 5) Alokasi anggaran lebih ditingkatkan lagi dalam memfasilitasi kegiatan kepegawaian baik peningkatan sarana prasarana maupun peningkatan kompetensi SDM Aparatur.
- 6) Melakukan Monitoring dan Evaluasi kegiatan.
- 7) Menerapkan sistem *reward* dan *punishment* secara lebih tegas lagi terhadap seluruh Pegawai guna meningkatkan kedisiplinan.
- 8) Peningkatan kerjasama dengan pihak Provinsi dalam rangka koordinasi teknis yang lebih matang dalam pelaksanaan seleksi jabatan.
- 9) BKPSDMD sebagai lembaga yang memiliki fungsi untuk melaksanakan pembinaan pegawai selalu berupaya untuk meningkatkan kepatuhan dan kesadaran PNS terhadap peraturan disiplin dengan serius menangani seluruh kasus pelanggaran disiplin PNS.
- 10) Setiap OPD wajib menyiapkan anggaran untuk penyelenggaraan Diklat Teknis Fungsional baik melalui pola kerjasama dan pengiriman kepada lembaga.

3.2. Kebijakan Strategis yang Ditetapkan

No.	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1.	Tidak ada	-	-

3.3. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

No.	Rekomendasi DPRD Tahun-1	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1.	Tidak ada	-	-

BAB IV

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

(Tidak Ada)

BAB V

PENUTUP

Secara umum pelaksanaan Program Kegiatan di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Flores Timur berjalan dengan baik, hal tersebut dapat dilihat pada realisasi pelaksanaan Program dan Kegiatan terkhusus pada pelaksanaan urusan wajib mampu mencapai angka pencapaian diatas 90%. Keberhasilan ini diharapkan dapat menjadi pemicu dalam pelaksanaan program/kegiatan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang meskipun dalam beberapa hal masih ada hambatan atau kendala yang harus diperbaiki secara terus-menerus.

Diharapkan juga agar informasi yang termuat dalam Laporan ini dapat bermanfaat sebagai data pendukung dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPI) Bupati Flores Timur Tahun Anggaran 2022.

Demikian Laporan ini dibuat semoga dapat bermanfaat bagi semua.

Larantuka Januari 2023

Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Kabupaten Flores Timur,

Rufus Koda Teluma, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 19690725 199703 1 005

BAB V

PENUTUP

Secara umum pelaksanaan Program Kegiatan di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Flores Timur berjalan dengan baik, hal tersebut dapat dilihat pada realisasi pelaksanaan Program dan Kegiatan terkhusus pada pelaksanaan urusan wajib mampu mencapai angka pencapaian diatas 90%. Keberhasilan ini diharapkan dapat menjadi pemicu dalam pelaksanaan program/kegiatan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang meskipun dalam beberapa hal masih ada hambatan atau kendala yang harus diperbaiki secara terus-menerus.

Diharapkan juga agar informasi yang termuat dalam Laporan ini dapat bermanfaat sebagai data pendukung dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Flores Timur Tahun Anggaran 2022.

Demikian Laporan ini dibuat semoga dapat bermanfaat bagi semua.

Larantuka Januari 2023

Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Kabupaten Flores Timur,



Rurus Koda Teluma, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 19690725 199703 1 005



LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Tahun Anggaran 2022
periode 01 Januari 2022 s.d. 31 Desember 2022

Urusan Pemerintahan : 5.03 KEPEGAWAIAN
SKPD : 5-03.5-04.0-00.01 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Unit Organisasi : 5-03.5-04.0-00.01.000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub Unit Organisasi : 5-03.5-04.0-00.01.000.000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / KURANG
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
5	BELANJA DAERAH	7.294.961.651,00	0,00	6.979.139.944,00	6.979.139.944,00	(315.821.707,00)
5.1	BELANJA OPERASI	7.294.961.651,00	0,00	6.979.139.944,00	6.979.139.944,00	(315.821.707,00)
5.1.01	Belanja Pegawai	3.085.445.894,00	0,00	2.916.576.128,00	2.916.576.128,00	(168.869.766,00)
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.506.687.400,00	0,00	2.443.621.980,00	2.443.621.980,00	(63.065.420,00)
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	1.829.847.880,00	0,00	1.818.247.800,00	1.818.247.800,00	(11.600.280,00)
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	228.162.620,00	0,00	213.973.214,00	213.973.214,00	(14.189.406,00)
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	172.068.960,00	0,00	163.425.000,00	163.425.000,00	(8.643.960,00)
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	91.228.200,00	0,00	80.200.000,00	80.200.000,00	(11.028.200,00)
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	38.936.100,00	0,00	37.535.000,00	37.535.000,00	(1.401.100,00)
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	139.963.040,00	0,00	128.907.600,00	128.907.600,00	(11.055.440,00)
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	6.394.500,00	0,00	1.307.040,00	1.307.040,00	(5.087.460,00)
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	86.100,00	0,00	28.528,00	28.528,00	(57.574,00)
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	541.258.494,00	0,00	440.704.148,00	440.704.148,00	(100.554.346,00)
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	242.392.012,00	0,00	203.157.448,00	203.157.448,00	(39.234.568,00)
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	2.778.564,00	0,00	490.802,00	490.802,00	(2.287.762,00)
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	296.087.918,00	0,00	237.056.100,00	237.056.100,00	(59.031.818,00)
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	37.500.000,00	0,00	32.250.000,00	32.250.000,00	(5.250.000,00)
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	37.500.000,00	0,00	32.250.000,00	32.250.000,00	(5.250.000,00)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.209.515.757,00	0,00	4.062.563.816,00	4.062.563.816,00	(146.951.941,00)
5.1.02.01	Belanja Barang	363.655.757,00	0,00	363.491.067,00	363.491.067,00	(164.690,00)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	363.655.757,00	0,00	363.491.067,00	363.491.067,00	(164.690,00)
5.1.02.02	Belanja Jasa	2.601.420.000,00	0,00	2.567.265.496,00	2.567.265.496,00	(34.154.504,00)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	752.146.000,00	0,00	717.991.496,00	717.991.496,00	(34.154.504,00)
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	26.000.000,00	0,00	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00
5.1.02.02.11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	61.100.000,00	0,00	61.100.000,00	61.100.000,00	0,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	1.722.174.000,00	0,00	1.722.174.000,00	1.722.174.000,00	0,00

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / KURANG
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
		13.900.000,00	0,00	13.841.000,00	13.841.000,00	(59.000,00)
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	10.900.000,00	0,00	10.841.000,00	10.841.000,00	(59.000,00)
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.202.415.000,00	0,00	1.089.841.253,00	1.089.841.253,00	(112.573.747,00)
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	1.202.415.000,00	0,00	1.089.841.253,00	1.089.841.253,00	(112.573.747,00)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	28.125.000,00	0,00	28.125.000,00	28.125.000,00	0,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	8.125.000,00	0,00	8.125.000,00	8.125.000,00	0,00
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					
	SURPLUS / DEFISIT	(7.294.961.651,00)	0,00	(6.979.139.944,00)	(6.979.139.944,00)	315.821.707,00
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(7.294.961.651,00)	0,00	(6.979.139.944,00)	(6.979.139.944,00)	315.821.707,00

